

KLIPING MEDIA 2019

KABUPATEN KEPAHIANG MINGGU, 20 OKTOBER 2019

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA			
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS			
	RADAR BENGKULU				

,		-00	DI DE	DIT		ITIIL	DDV
۸	AII	=60	KI BE	EKIIA	4 Or	vior	BPK

ľ		1		
POSITIF	x	NETRAL	BAHAN PEMERIKSAAN	PERHATIAN KHUSU

IPM Kabupaten Kepahiang Masih Minim

Hasil Audit BPK Dari Sampel 5 OPD

KEPAHIANG - Hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu pada beberapa sampel Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepahiang, menyebutkan Indeks Pengembangan Manusia (IPM) di Kabupaten Kepahiang masih sangat minim.

Ini dikatakan Kepala Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Kepahiang, Harun, SE, AK, M.Si. Menurutnya dari 5 OPD yang dijadikan sampel, yakni Disparpora, Disdikbud, Dinkes, Distan, dan Bappeda, angka IPM Kabupaten Kepahiang masih perlu terus ditingkatkan. Tetapi Harun belum bisa beberkan di angka berapa IPM Kabupaten Kepahiang pasca hasil audit BPK

tersebut.

"Kita masih butuh programprogram yang langsung menyentuh masyarakat. Sehingga asas manfaat yang didapat masyarakat bisa berpengaruh terhadap peningkatan IPM kita kedepannya," jelas Harun.

Menurut Harun, audit yang dilakukan BPK beberapa waktu lalu, meliputi semua elemen jajaran OPD dibawahnya. Seperti saat melakukan survey di Dinas Kesehetan, seluruh puskemas yang ada ikut dilakukan survey. Begitu juga di Disdikbud, semua sekolah dibawah naungan Disdikbud pun tak luput menjadi objek survey.

"Kita contohkan Dinas Pertanian, berdasarkan hasil survey yang dilakukan BPK diketahui program yang dilakukan selama 2019 ini belum sepenuhnya menyentuh masyarakat di wilayah Kabupaten Kepahiang. Inilah yang perlu kita benahi keder agar IPM kita terus meningkat, ielasnya.

Begitu juga untuk sektor pendidikan, dimana setiap tahun Disdikbud selalu mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Baik berupa pembangunan fisik maupun bantuan lainnya. Namun sejauh ini belum bisa memberikan garis lurus terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah.

"Intinya pengelolaan anggaran yang dimiliki OPD harus bisa memberikan asas manfaat pada masyarakat. Sebab BPK RI akan melakukan audit tiap tahunnya pada OPD yang ada di Kabupaten Kepahiang. Kita harapkan tahun mendatang adanya peningkatan IPM yang menandakan Kabupaten Kepahiang ini setiap tahun terus mengalami peningkatan perekonomian masyarakat," demikian Harun. (sly)